



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

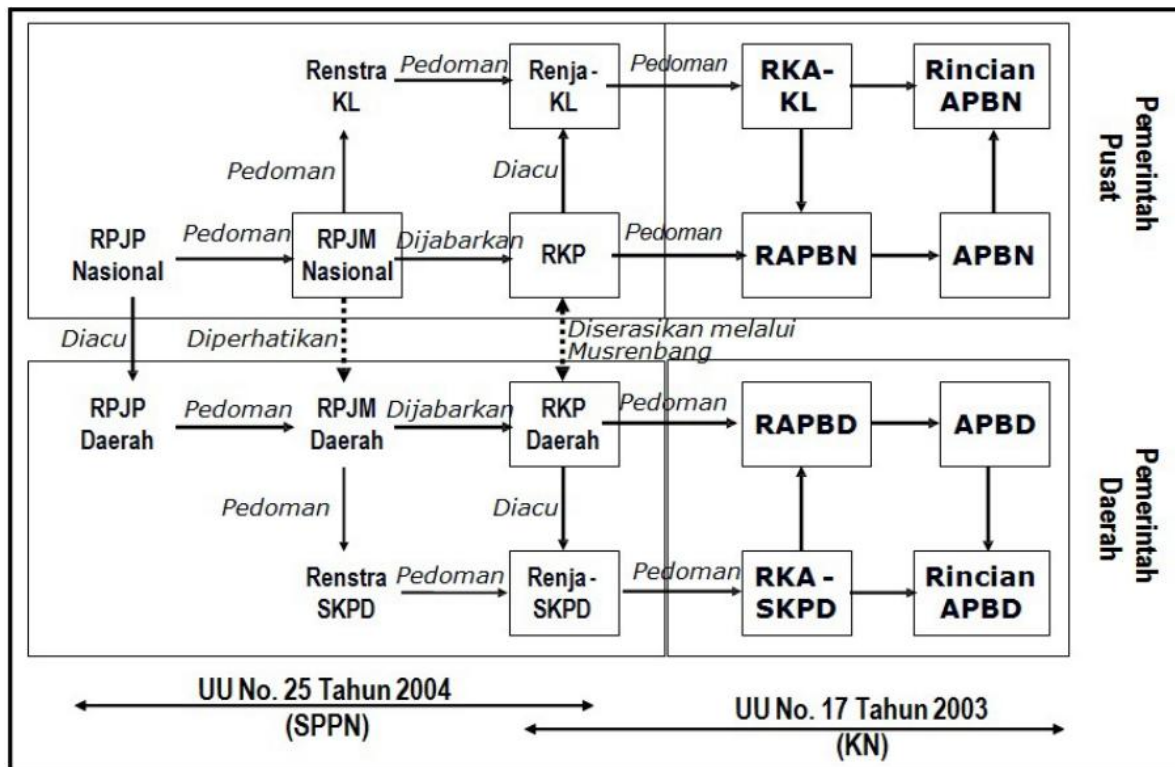
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun

2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada

Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024,
2. evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul										
Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	96	81	95,05	117,34	83	83	100
1.05.01.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.201.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		4		4				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	20	4	4	4	100	4	12	60
1.05.01.201.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja		1		1				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5	1	1	1	100	1	3	60
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14		14				
		Pembayaran TPP		12		12				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50	41	50	50	100	50	50	100
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Laporan hasil penatausahaan		3		3				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	15	3	3	3	100	3	9	60
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan		1		1				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	5	1	2	2	100	1	4	80
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi		235		235				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1,175	235	235	235	100	235	705	60
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan	Alat tulis kantor		12		12				
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12		12				
		Laporan SPPD dalam daerah		12		12				
		Laporan SPPD luar daerah		12		12				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD*	60	12	12	12	100	12	36	60
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60
	Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75
	Kunjungan Tamu*	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		5		5				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60	12	12	12	100	12	36	60
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang dipelihara		52		52				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
	Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	52	52	52	52	100	52	52	100
1.05.01.2.0 9.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara		5		5				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50	49	50	49	100	50	50	100
1.05.01.2.0 9.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara		1		1				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1	1	1	1	100	1	1	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	90	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	10	10	10	100	10	30	60
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	60
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.02.2.0 1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
1.05.02.2.0 1.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan intel kewilayahan		12		12				
		Laporan patroli kewilayahan		12		12				
		Laporan pengamanan kewilayahan		12		12				
		Laporan pengawalan pejabat		12		12				
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan		12		12				
		Patroli kewilayahan		12		12				
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	12	12	12	12	100	12	12	100
1.05.02.2.0 1.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan		12		12				
		Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani		12		12				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	300	300	100	100	100	300	300	100
1.05.02.2.0 1.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan pemberdayaan Linmas		12		12				
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan		99		99				
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		100		100				
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	60	12	12	12	100	12	36	60
1.05.02.2.0 1.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia		100		100				
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	500	1440	1600	1600	100	100	3140	628

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
		Kapasitasnya*								
1.05.02.2.0 1.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi		3		3				
		Jumlah Saranadan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	30	26	30	30	100	30	30	100
1.05.02.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara an Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12		12	12	100	12	12	100
1.05.02.2.0 1.0006	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12		12	12	100	12	12	100
1.05.02.2.0 1.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah	12		18	18	100	12	12	100
		Dibuat dan Dimutakhirkan								
1.05.02.2.0 1.0017	Sub Kegiatian Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12		12	0	0	12	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	60	24	12	12	100	12	48	80
1.05.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan	Peserta Sosialisasi		100		100				
	Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup								
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada		1		1				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	12	12	12	12	100	12	12	100
1.05.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Laporan sidang		12		12				
	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
		Laporan yustisi dan non yustisi		4		4				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*								
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100		100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*	12	12	12	12	100	12	12	100
2.22.08	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	100	97	66,88	100	149,52	88,31	100	100
2.22.08.2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	933	803	129	129	100	832	933	100
2.22.08.2.09.0017	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga		25		25				
		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	16,975	3,875	5,000	5,000	100	2,725	11,600	68,33

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tidak ada laporan korban luka dan atau kerugian material dari masyarakat terkait dampak penegakan perda
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umu Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kegiatan menyesuaikan jadwal pilkada (ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan antara lain PSU/ PSL, pengajuan PHPU, dan antisipasi konflik dan ada kegiatan yang dijadwal ulang di tahun 2025 antara lain penetapan paslon, pengawalan paslon terpilih, pelantikan dan patrol pasca penetapan).

- 2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya koordinasi secara rutin
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen sesuai jadwal yang ditentukan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecepatan dan ketepatan data
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelancaran aplikasi penatausahaan keuangan dan kecermatan dalam verifikasi keuangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyedia barang yang kompeten
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan anggaran
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi yang intensif
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Arsiparis yang handal
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Ketersediaan anggaran jamuan tamu
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Data alat kebersihan yang update
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Data kendaraan dinas yang update
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan anggaran
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Tidak dilaksanakan*
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Penyedia barang yang kompeten
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Target indikator kinerja utama Satpol PP yang harus tercapai
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Call center dan media sosial
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi yang intensif dengan Satlinmas
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Data satlinmas yang belum mendapatkan pelatihan
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mengacu pada rencana aksi SPM
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Koordinasi lintas sektor yang intensif
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Kerjasama lintas sektor yang baik
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Reviu SOP sesuai peraturan terbaru
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perlunya tindakan penegakan pelanggaran perda dan perbup
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Warga masyarakat yang akan diberi sosialisasi
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kapasitas personel Satpol PP
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kapasitas PPNS yang ada di Satpol PP
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Perlunya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kapasitas personel PPNS yang ada di Kabupaten Bantul
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Menindaklanjuti Pergub terbaru

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	tentang Jagawarga
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Optimalisasi Jagawarga sebagai forum diskusi dan kontrol sosial
	Pembinaan Jagawarga	Ketersediaan anggaran

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan pemenuhan target Indikator Kinerja Utama;
2. Optimalisasi kegiatan pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum;
3. Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana serta anggaran;
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
5. Akselerasi laporan data tepat waktu;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
 Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IKU Lama : Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	IKU Baru : Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	64,02%	68,05%	72,31%

Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. NIHIL

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

 - a. NIHIL
2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

 - a. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Sistem pengaduan melalui aplikasi aduan dan media sosial telah mendukung dalam proses penanganan gangguan trantibum;
 - c. Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan trantibum; dan
 - d. Pembentukan kelompok Jagawarga sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai - nilai luhur yang ada di masyarakat;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menjalin sinergitas antara aparaturnya terkait dan masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada agar tercipta lingkungan yang tertib, aman dan produktif sesuai dengan tujuan dari peraturan yang ditetapkan;
2. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung;
3. Perlunya meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis
4. Perlunya membangun budaya pengamanan mandiri oleh masyarakat melalui kelembagaan yang ada seperti Satlinmas dan Kelompok Jagawarga;
5. Perlunya meningkatkan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah personil intelijen dan PPNS masih terbatas
Terjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi terkait lainnya dalam mendukung kinerja perangkat daerah	Terbatasnya sarana dan prasarana trantibumlinmas dalam menunjang ketugasan personil
Adanya dasar hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Penyelenggaraan Ketentruman dan Ketertiban Umum	Dasar hukum penegakan perda/perkada perlu diperbaharui

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Adanya regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
Dukungan dana keistimewaan	
Dukungan personil untuk kegiatan patroli gabungan dengan instansi terkait	Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketenteraman umum dan penegakan perda	Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP
	Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	11.490.553.999	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	11.490.553.999	
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	37.206.440	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	37.206.440	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.083.988	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.083.988	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.122.452	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.122.452	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9.125.145.974	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9.125.145.974	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang /Bulan	7.155.244.335	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	7.155.244.335	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	1.969.901.639	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.969.901.639	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian	100 persen	359.908.410	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian	100 persen	359.908.410	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	170.531.047	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	170.531.047	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 orang	189.377.363	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 Orang	189.377.363	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	323.210.497	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	323.210.497	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.411.770	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.411.770	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	150.411.770	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.411.770	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	450.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	450.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	517.565.004	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	517.565.004	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	517.565.004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	517.565.004	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	647.479.557	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	647.479.557	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	563.604.507	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	563.604.507	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	18.594.070	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	18.594.070	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.280.980	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.280.980	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	20.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000.0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000.0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Bantul	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	3.436.809.527	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Bantul	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	3.436.809.527	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 persen	2.760.306.301	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 persen	2.760.306.301	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan. dan Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	1.562.400.034	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	1.562.400.034	
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	504.312.582	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Laporan	504.312.582	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	12 Dokumen	536.626.021	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	12 Dokumen	536.626.021	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Ketertiban Umum		rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			dan Ketertiban Umum		rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	137.398.464	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	137.398.464	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	30 Unit	17.569.200	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	30 Unit	17.569.200	
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggara an ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Ko ta	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggara an ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	500.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman	12 Dokumen	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	masyarakat		Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			masyarakat		Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanj	100 persen	676.003.226	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanj	100 persen	676.003.226	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	12 Laporan	128.051.492	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	12 Laporan	128.051.492	
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	530.951.734	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 Laporan	530.951.734	
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas	12 Laporan	17.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas	12 Laporan	17.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 persen	500.000	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 persen	500.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	500.000	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	500.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	100 persen	1.500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	88.31 Persen	1.500.000.000	
	Kegiatan Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	933 pedukuh an	1.500.000.000	Kegiatan Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	832 pedukuh an	1.500.000.000	
	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	2.725 orang	1.500.000.000	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	5000 Orang	1.500.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Kegiatan Penanganan Gangguan	Kab. Bantul	Penyuluhan Sadar Trantibum	2 kegiatan	Usulan Kalurahan
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Peningkatan Kapasitas Satlinmas	1 kegiatan	Usulan Kalurahan
	dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Pengadaan Sarana dan Prasarana Satlinmas	1.066 unit	Usulan Kalurahan

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/ *quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki
5. Pemberantasan kemiskinan.	
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja	sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	n/a	74	75
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Linmas)	Indeks	n/a	74	75
2		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Persen	64,02%	68,05%	72,31%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Satuan Polisi Pamong Praja						14.138.069.185,00						14.175.722.066,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.761.930.185,00								13.875.722.066,00		
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.761.930.185,00								13.875.722.066,00		
1	1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-			82,66 Persen 93,87 Persen	9.663.807.878,00						-	9.468.316.550,00			
	1	0 5	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	26.946.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	27.215.864,00			
	1	0 5	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	9.361.400,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		9.455.014,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0 5	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	17.585.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		17.760.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0 5	0 1	2. 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	8.250.132.182,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	8.332.633.504,00		
	1	0 5	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					64 Orang/bul an	6.493.067.980,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		6.557.998.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0 5	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD					3 Dokumen	1.757.064.202,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		1.774.634.844,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	199.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	191.734.500,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	106.015.700,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		95.291.171,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				235 Orang	93.634.300,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		96.443.329,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 persen	262.516.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	124.345.060,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														dan penyeludupan.	pelestarian budaya					
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	48.664.045,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		50.123.966,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		12.875.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.904.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		60.884.654,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	448.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		461.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	30.385.000,00		
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	0,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		13.905.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	16.000.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		16.480.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	-			100 persen	391.829.001,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	403.583.871,00					
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391.829.001,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		403.583.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-			100 persen	516.734.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	358.418.751,00					
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	486.400.750,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul		327.175.246,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot a				1 Dokumen	4.329.800,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		4.416.396,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	1.102.957.734,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		1.238.677.269,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	4.930.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		5.028.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	0	0	2.	00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				9 Dokumen	5.280.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		5.385.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
							Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				700 Orang	68.865.300,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		183.902.989,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	1.159.782.151,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		1.182.977.794,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														yang adil dan makmur.						
	1	0	0	2.	00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	773.711.404,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		789.185.632,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	6.770.400,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		6.905.808,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				21 Unit	5.250.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		5.355.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	-			100 persen	958.933.018,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul	-	978.111.678,00	
	1	0	0	2.	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	242.338.517,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Kabupaten Bantul		247.185.287,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	7.312.500,00	Kab. Bantul , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Anggota PPNS Kabupaten Bantul		7.458.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						376.139.000,00								300.000.000,00	
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						376.139.000,00								300.000.000,00	
3	2	2 2	0 8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	-			100 Persen	376.139.000,00						-	300.000.000,00		
	2	2 2	0 8	5. 07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	-			5000 Orang	376.139.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyaraka t Pedukuha n	-	300.000.000,00		
	2	2 2	0 8	5. 07	00 12	Pembinaan Jagawarga															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina					5000 Orang	376.139.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Pedukuhan		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H												14.138.069.185,00							14.175.722.066,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

✧ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ✧
Kabupaten Bantul



Raden Jati Bayubroto, SH. M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002